

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dyah Mutiarin, 2014, *Majamen Birokrasi dan Kebijakan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Nuansa.
- Nico Ngani, 1984, *Beberapa aspek Tantangan terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Philipus M. Hadjon, et.all, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- R. Atang Ranoemiharja, 1982, *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek - Aspek dalam Pelaksanaan UUPA di Bidang Agrarian di Indonesia*, Bandung, Tarsito.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soehino, 1984, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Adhitya Bakti.
- Wahab, S. A , 2010, *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Rineka Cipta.

Jurnal

- Anugrah Yulistiono R. (2018). Irfan Setiawan, “Pelayanan Aparatur dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol.3, No. 1.

- Deni. (2017). "Pelayanan Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis". *Moderat: Jurnal Ilmial Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 4.
- Diediek R. Mawardi. (2015). "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat", *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 44, No. 3.
- Efridawati, M. Arif Nasution. (2013). "Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1.
- Haedar Akib. (2010). "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No.1.
- Hardiyansyah. (2012). "Analisis Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota di Kota Palembang". *Jurnal Mimbar*, Vol. 28, No.2.
- Haris Budiman, Suwari Akhmaddhian. (2013). "Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan". *Jurnal Unifikasi*. Vol. 1, No.1.
- Irsa Yonanda, Mochammad Makmur, Romula Adiono. (2013). "Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Sektor Industri Pariwisata Di Kota Batu (Studi Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Batu)". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1.
- Ivan Fauzan Raharja. (2015). "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Nanang Superman. (2017). "Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat". *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 13, No. 1.
- Oktariyanda, *et al.*.(2013). "Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal". *Wacana*, Vol.16, No.4.
- Primastuti Sari Anggraeni. (2017). "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Usaha Di Kabupaten Klaten". *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Vol. 1, No. 1.

Yudicia Pranata, Imam Hanafi, Suwodo. (2013). “Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi pada Kantor Pelayanan perijinan Terpadu Kota Batu)”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1.

Skripsi

Yunus Ardiansyah, 2018, “Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Wawancara

Wiratmanto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam Penyuluhan Hukum dan Penjelasan tentang Penegakan Hukum di Indonesia di lingkungan warga RT. 73 RW 23 Mergangsan Kidul, Kelurahan Wiroguna, Kecamatan Mergangsan, 15 Februari 2019.

Sri Redjeki Hartono, “Aspek Keperdataan pada Pelayanan Publik”, disampaikan dalam seminar RUU Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Mei 2003.

Rudi S.E, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, hasil wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, 17 Januari 2020.

Yoyo Sutaryo, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah SATPOL PP Kabupaten Ciamis, hasil wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, 13 Januari 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan kepada Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yaitu belum bisa membuka peluang usaha dan meningkatkan Perekonomian Daerah berbasis online.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standarisasi Bangunan Gedung.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan-Bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang “Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja”.

Lampiran Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Internet

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu “Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan”,
<https://dpmptsp.ciamiskab.go.id/persyaratanperizinan>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pada pukul 16.09 WIB.

Agus Riyanto, “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?”,
<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pada pukul 16.21 WIB.

Dokumen terkait

Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

Rencana Strategis 2019-2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.